

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapsiagaan pemerintah desa dan upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman datangnya bencana alam. Menurut Sugeng Triutomo (2011) kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil-gunaan berdaya-guna.. Sedangkan menurut Sutton dan Tiemey (2006) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai kegiatan yang sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang. (Dodon, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kesiapsiagaan berdasarkan Sutton dan Tiemey (2006) untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah desa yakni desa Sumberejo dan desa Kepakisan dan apa upaya yang dilakukan dalam menghindari dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman-ancaman bencana khususnya bencana erupsi kawah yang terdapat di dua desa tersebut yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti jatuhnya korban jiwa kerugian harta benda, dan lainnya bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Bencana alam yang tidak dapat diprediksi menyebabkan kesiapsiagaan menjadi penting bagi setiap negara. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan akan bencana alam di dunia menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR). Berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. PP Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sedang bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit (PP, 2008).

Bencana alam menjadi ancaman nyata bagi Indonesia secara umum karena letak geografis Indonesia yang berada di sekitar cincin api, pertemuan antar patahan lempeng bumi benua-benua besar dan banyaknya gunung api yang masih aktif hingga kini menyebabkan potensi kompleksitas gempa tektonik dan vulkanik dapat terjadi dari masa ke masa. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara samudera terluas

di dunia yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat potensi bencana alam jadi semakin kompleks karena memungkinkan terjadinya anomali iklim, cuaca, banjir, longsor, badai, topan dan sebagainya (Usmayati, 2012). Indonesia menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi. Wilayah Indonesia yang berpotensi tinggi akan kerawanan bencana salah satunya adalah di pulau Jawa, hampir semua jenis bencana terjadi di pulau Jawa mulai dari banjir, tanah longsor badai angin dan erupsi gunung berapi. Salah satu bencana yang mengancam di Indonesia yang tidak dapat diprediksi selain gempa bumi adalah aktifitas gunung api yang masih aktif di Indonesia (Wahyuni, 2015). Persebaran Gunung api di Indonesia dapat dilihat pada peta 1.1 dibawah ini.

Peta 1.1

Persebaran Gunung Api di Indonesia



Sumber : PVMBG (2017)

Berdasarkan peta persebaran diatas indonesia memiliki 147 gunung api. Salah satunya adalah Gunungapi Dieng, yang merupakan gunung api aktif di indonesia menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG: 2017). Berdasarkan wilayah administratif, kawasan tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo yang memiliki ketinggian tempat berkisar antara 1500-2000 mdpal, dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3500 mm/tahun. Secara umum geologis kondisi fisik lahan sebagian besar merupakan bentukan dan pengaruh dari aktivitas gunungapi dengan kemiringan lahan mulai dari datar, curam hingga sangat curam serta lapisan tanah dari jenis andosol dan regosol yang memiliki karakteristik mudah tererosi dan longsor (Rizal, 2017).

Komplek Gunung api Dieng merupakan satu kesatuan gunung api besar yang mengalami letusan dan kehilangan kalderanya dengan kerucutnya terdiri dari Bisma, Seroja, Binem, Panganan Merdada, Pagerkandang, Telogo Dringo, Pakuwaja, Sikunir, dan Prambanan. Selama ratusan tahun setelah mengalami letusan, kaldera wilayah tersebut kemudian ditumbuhi oleh beberapa kawah dan gunung api baru yang sampai saat ini masih bisa dilihat aktivitas keaktifannya (Rizal, 2017). Keaktifan kawah yang ada di Gunung Dieng rutin dipantau oleh pihak dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang ada di daerah tersebut.

Keberadaan kawah yang berstatus aktif di wilayah tentu dapat mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar kawah. Beberapa kejadian erupsi yang pernah terjadi pada kawah yang berada di Kawasan Gunung Dieng dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 : Sejarah Erupsi kawah Gunung Dieng

Tahun	Nama Kawah	Aktivitas letusan	Material Hasil Letusan
1450	Pakuwojo	Letusan normal	Abu/Pasir
1825/1826	Pakuwojo	Letusan normal	Abu/Pasir
1883	Kw.Sikidang/Banteng	Peningkatan kegiatan	Lumpur kawah
1884	Kw.Sikidang	Letusan normal	-
1895	Siglagak	Pembentukan celah	Uap belerang
1928	Batur	Letusan Normal	Lumpur dan batu
1939	Batur	Letusan normal	Uap dan Lumpur,5 orang meninggal
1944	Kw.Sileri	Gempabumi dan letusan	Lumpur/59 meninggal,38 luka-luka, 55 orang hilang
1964	Kw.Sileri	Letusan normal	Lumpur
1965	Kw.Condrodimuko/ Telaga Dringo	Hembusan fumarola, lumpur (?)	Uap air dominan
1979	Kw.Sinila	Hembusan gas racun	Gas CO ₂ , CO ?, CH ₄ ,Korban 149 meninggal
1990	Kw. Dieng Kulon	Letusan freatik	Lumpur
2002	Terjadi Gempa Terasa sebanyak 7 kali.	Tidak Diikuti dengan letusan	-
2003	Kw. Sileri	Letusan Freatik	Lumpur
2006	-	Peningkatan kegempaan yang diawali dengan gempa terasa (tektonik lokal) pada tanggal 2 April 2006	-

2009	Kw. Sibanteng	Letusan freatik	Lumpur
------	---------------	-----------------	--------

Sumber: Direktorat Vulkanologi ESDM (2014)

Pada tahun 2011 kembali terjadi erupsi di salah satu kawah yaitu Kawah Timbang. Kawah timbang merupakan salah satu kawah aktif di Kawasan Gunung Dieng tepatnya di desa Sumberejo. Kawah tersebut mengalami peningkatan aktifitas dengan menyemburkan asap putih setinggi 20 meter dan juga gempa tremor. Namun bencana tersebut tidak menimbulkan adanya korban jiwa, hanya saja bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi kejadian dilakukan pengamanan atau pengungsian. Jumlah warga yang diungsikan dari Desa tersebut sejumlah 100 orang selama 14 hari hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Fahrudin Slamet Susiadi.

Kawah sileri yang berada di Desa Kepakisan kembali menunjukkan aktifitasnya setelah letusan yang terakhir terjadi pada tahun 2003 kembali mengalami erupsi. Diikutip dari salah satu kabar berita online (detik.com:2017) pada tanggal 2 Juli 2017 kawah sileri kembali menunjukkan adanya peningkatan aktivitas disusul dengan letusan yang menyebabkan 17 wisatawan dievakuasi dan 4 diantaranya mengalami luka (Hidayat, 2017). Hingga 14 September 2017 pukul 22.30 WIB Kawah Sileri menunjukkan peningkatan dari 90,°C menjadi 93,°C. Dan suhu tanah di Kawah Sileri juga menunjukkan peningkatan dari 58,6 °C menjadi 69,4°C. Sedangkan pengukuran suhu Kawah Timbang sejak 25 Mei 2017

sampai 13 September 2017 juga menunjukkan peningkatan dari rata-rata 57,3°C menjadi 62,7°C. Sedangkan suhu tanah di Kawah Timbang sejak 1 Juni 2017 sampai 13 September 2017 menunjukkan trend menurun 18,6°C menjadi 17,2°C. Konsentrasi CO₂ di Kawah Timbang sejak 25 Mei 2017 sampai 13 September 2017 berkisar antara 0,22% - 0,24%. dan tidak menunjukkan adanya peningkatan (ESDM, 2017)

Pasca meletusnya kawah Sileri di Desa Kepakisan, pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memantau secara intensif 2 kawah yang disebutkan sebagai kawah berbahaya yakni Kawah Timbang di Desa Sumberejo dan Kawah Sileri di Desa Kepakisan (Andrianto, 2013). Pemantauan tersebut dilakukan dikarenakan status keaktifan pada kawah Sileri dan juga kemungkinan munculnya gas beracun pada kawah Timbang. Dari 2 kawah tersebut Kawah Timbang dinilai lebih berbahaya dari pada Kawah Sileri karena perbedaan kandungan gas yang ada di dalamnya. Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah Badan Geologi Agus Budianto mengatakan bahwa Kawah Timbang lebih berbahaya dari pada Kawah Sileri karena adanya perbedaan kandungan gas dari masing-masing kawah. Kawah Timbang mengandung gas beracun yakni gas Hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang sangat berbahaya. Sedangkan Kawah Sileri mengandung air (Billy, 2017). Hal ini lah yang kemudian menjadikan Kawah Timbang sebagai Kawah yang paling mematikan dan harus di waspadai.

Melihat besarnya potensi bencana alam yang ada pada kawasan Gunung Dieng khususnya bencana gas beracun dan erupsi kawah menuntut adanya kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi bagi BPBN dan juga pemerintah daerah. Bencana alam yang tidak dapat diprediksi menyebabkan kesiapsiagaan menjadi penting bagi setiap negara. Hal ini diungkapkan Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Asia Tenggara Dr Poonam Khetrapal Singh. Kesiapan sumberdaya yang kompeten juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanggulangan bencana alam. Tidak hanya itu, aparat pemerintahan desa juga harus mampu menjadi motor gerakan penanggulangan bencana diwilayahnya, dimana dalam hal ini aparat pemerintah sebagai lini terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan menjadi sangat penting dalam usahanya membangun kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman bahaya. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bahwasanya sebuah Desa/Kelurahan harus memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika mengalami bencana alam. Bentuk dari penanggulangan ataupun pengurangan resiko bencana tersebut dapat berupa adanya peringatan dini maupun adanya pemanfaatan sumber daya lokal dan lain sebagainya. Disebutkan juga dalam Nawa Cita

Pemerintahan Jokowi - JK bahwasanya jelas diatur bahwa peran desa sangat penting dalam penanggulangan bencana.

Atas dasar kondisi itulah peneliti tertarik untuk meneliti “ Kesiapsiagaan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ancaman Bencana Erupsi Kawah di Desa Sumberejo dan Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapsiagaan pemerintah desa dalam mengantisipasi bencana erupsi kawah di Desa Sumberejo ?
2. Bagaimana kesiapsiagaan pemerintah desa dalam mengantisipasi ancaman bencana erupsi kawah di Desa Kepakisan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui seberapa siap pemerintah desa dalam mengantisipasi bencana alam di desa sumberejo dan kepakisan kecamatan batur kabupaten banjarnegara
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam kegiatan pra bencana alam di desa sumberejo dan kepakisan kecamatan batur kabupaten banjarnegara.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori mengenai penanggulangan bencana alam yang baik sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a.** Sebagai salah satu bentuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b.** Salah satu usaha untuk mengetahui seberapa besar kesiapan pemerintah desa dalam menanggulangi bencana alam di desa sumberejo kecamatan batur kabupaten banjarnegara. Dan dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja atas kesiapsiagaan pemerintah desa tersebut.
- c.** Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran dan informasi bagi pembaca, pihak yang diteliti, peneliti, , maupun peneliti selanjutnya.

1.5 Studi Terdahulu

Mengacu pada beberapa literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Adapun penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Radit Beki Nugroho (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang” bertujuan untuk Mengetahui pengelolaan manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses manajemen bencana di BPBD khususnya di Kota Semarang. Penelitian ini menekankan aspek wawancara terhadap tokoh-tokoh penting BPBD untuk mendapatkan data valid dan menghasilkan poin-poin penting dengan pendekatan yang menjadi pilihan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Wiryatmoko (2014) melakukan penelitian Tingkat Kesiapsiagaan Guru Terhadap Bencana Gempabumi Di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan dengan pendekatan metode sensus dengan hasil tingkat kesiapsiagaan guru dalam katogeri sangat siap.

Pratiwi (2016) melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari diadakannya pelatihan penanggulangan bencana gempa bumi terhadap kesiapsiagaan pada Palang Merah Remaja (PMR) khususnya di SMAN 1 Pleret Bantul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *pre-eksperimental* dengan rancangan *one group pre-test post-test design* dan melibatkan 22 siswa sebagai responden.

Paramesti (2011) melakukan penelitian tentang “Kesiapsiagaan Masyarakat Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami” Data yang di dapat dengan melalui survei langsung pada lokasi penelitian dan melalui beberapa kuisisioner dan melakukan wawancara terstruktur.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa yaitu Desa Sumberejo dan Desa Kepakisan dimana di dua desa tersebut terdapat kawah yang membahayakan. Atas dasar deskripsi singkat ini mempertegas keaslian topik tentang kesiapsiagaan Pemerintah Desa ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga meyakini bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk pengkayaan dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya dengan tema Kesiapsiagaan Pemerintah Desa dalam Mengantisipasi Bencana Alam.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Pengertian Kesiapsiagaan

Pengertian tentang kesiapsiagaan secara eksplisit dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kedudukan kegiatan kesiapsiagaan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk dalam kegiatan pra bencana seperti disebutkan dalam Pasal 33. Dalam tahapan pra bencana terbagi menjadi dua tahapan yakni dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Kesiapsiagaan, menurut Gillespie dan Streeter (1987) dalam Kusumasari (2014) adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana

BNPB (2008) menjelaskan secara rinci tentang bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan yaitu kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. upaya kesiapsiagaan

dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain: 1) Pengaktifan pospos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. 2) Pelatihan siaga/ simulasi/ gladi/ teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum). 3) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan, 4) Penyiapan dukungan dan mobalisasi sumber daya/ logistik, 5) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan, 6) Penyiapan dan pemasangan instrumen dan sistem peringatan dini (*early warning*), 7) Penyusunan rencana kontijensi (*contingency plan*), 8) Dan mobilisasi sumber daya personil dan sarana prasarana.

Hidayati dkk (2006) dalam LIPI-UNESCO (2006) mendefinisikan kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan resiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana. Di dalam proses pengelolaan bencana yang direpresentasikan sebagai model siklus, peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko bencana. Peranan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam suatu model peneglolaan bencana yang menerapkan konsep kembang- susut

(*expand-contract*), yang merepresentasikan secara lebih baik peranan dari berbagai komponen kegiatan pengelolaan bencana yang berjalan secara paralel.

UN/ISDR & UN/OCHA (2008:3) dan UN/ISDR (2009:4) dalam Mahdalena (2016) menyatakan bahwa kesiapsiagaan merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi profesional, komunitas, dan individu untuk mengantisipasi dan merespon secara efektif terhadap dampak dari yang akan terjadi atau kondisi rangkaian bahaya yang terjadi. ISDR dalam UN/ISDR dan UN/OCHA (2008:3) juga menambahkan bahwa aksi kesiapsiagaan meliputi rencana kontijensi, penimbunan peralatan dan perbekalan, servis darurat dan aturan siaga, komunikasi, manajemen informasi dan aturan koordinasi, pelatihan personel, pelatihan komutas dan drill (pelatihan yang berulang) dan edukasi publik.

Usaha-usaha kesiapsiagaan dapat dilakukan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat nasional, provinsi/daerah/kecamatan, organisasi individual, desa/kelurahan, RW/RT, rumah tangga, dan tingkat individu/perorangan. Berikut beberapa tujuan akan pentingnya kesiapsiagaan berdasarkan IDEP (2009):

1) Mencegah Resiko

Untuk mencegah bencana secara mutlak memang mustahil. Namun ada banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana atau mengurangi dampak bencana.

2) Mengurangi Korban

Apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk menentukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu

3) Meringankan Penderitaan

Untuk mengurangi penderitaan akibat suatu bencana, masyarakat perlu mempunyai persiapan supaya bisa cepat bertindak apabila terjadi bencana

4) Menjalin kerjasama

Hal ini tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat, penanganan bencana bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau, apabila diperlukan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk menjamin kerja sama yang baik, pada tahap persiapan ini masyarakat perlu menjalin hubungan dengan pihak-pihak tersebut.

Kesiapsiagaan dimaksudkan dengan tujuannya adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap di tempatnya masing masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (PAHO,2006). Kesiapsiagaan juga dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

1.6.2 Bencana Alam

Bencana alam menurut Kusumawati (2015) adalah bahaya yang dapat menimbulkan kehancuran atau perubahan lingkungan. Ada dua jenis bencana, yaitu bencana alam dan bencana buatan manusia. Terdapat 10 bencana alam yang sering terjadi di dunia terdiri dari topan, gempa bumi, tornado, gunung berapi letusan, tsunami, banjir, kebakaran, kekeringan, dan tanah longsor. Indonesia sebagai negara kepulauan rawan akan bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, dan tanah longsor.

Sugeng Triutomo (2011) mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Definisi bencana menurut International strategy for disaster reduction (UN-ISDR, 2004), dalam mahdalena (2016) bahwa bencana (disaster) diartikan sebagai gangguan serius pada berfungsinya komunitas atau masyarakat disertai kehilangan dan dampak yang luas terhadap manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat terdampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 1 tentang penanggulangan bencana. Mendefinisikan bencana alam sebagai bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaranya berupa bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana alam menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

1.6.3 Jenis Bencana

Berbagai bencana alam dapat terjadi di Indonesia, jenisnya pun berbeda-beda. Oleh karenanya Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI, 2011) membagi bencana menjadi 3 jenis yakni :

Pertama, Bencana Alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kedua, Bencana non alam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

Ketiga, Bencana sosial yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror. Definisi bencana diatas mengandung 2 aspek yakni terdapat tiga jenis bencana yakni bencana alam, non alam dan bencana sosial. Bencana alam diantara lain tsunami, gunung meletus, gempa bumi dll. Bencana non alam contohnya yakni adanya penyebaran penyakit di lingkungan sekitar. Bencana sosial yakni terjadinya perpecahan budaya dan lain sebagainya.

Menurut Nurjana dkk (2012) untuk dapat disebut sebagai bencana suatu keadaan harus memenuhi kriteria berikut 1) Ada

peristiwa, 2) Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia, 3) Terjadi tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara bertahap (*slow*). 4) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain, yang berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Menurut Oktiavenny (2015) Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh adanya ulah manusia (*man-made disaster*), beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya bencana yaitu 1).Bahaya alam (*natural hazard*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. 2).Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur dan juga elemen-elemen di dalam kota atau kawasan yang beresiko bencana. 3).Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

1.6.4 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara guna melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Menurut Utami (2016) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi tiga kegiatan yaitu, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Dengan demikian kedudukan kegiatan kesiapsiagaan dalam siklus bencana sangat jelas yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kegiatan tersebut meliputi :

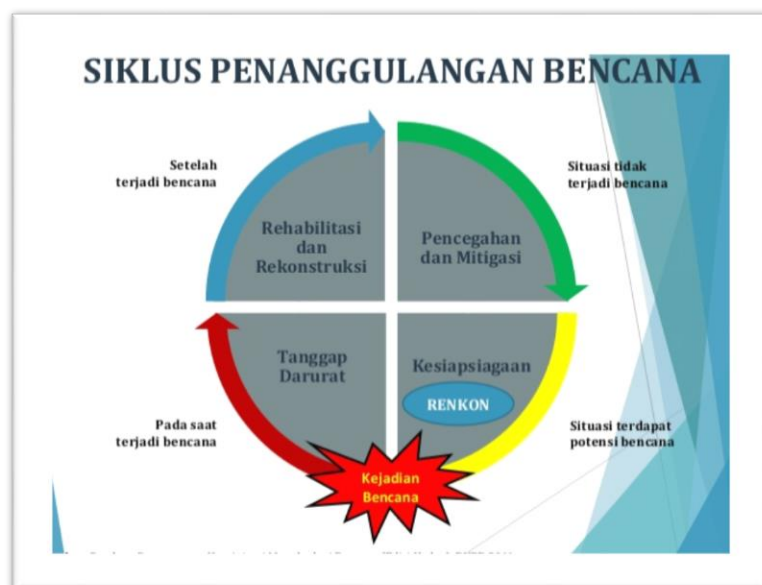
1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

1.6.5 Tahapan Penanggulangan Bencana

Pada manajemen bencana dikenal 4 (empat) tahapan/bidang kerja penanggulangan bencana sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Tahapan penanggulangan bencana



Sumber : (BNPB,2011)

Berdasarkan gambar di atas pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan kebencanaan dibagi menjadi tiga tahap menurut BNPB (2008) yakni: 1) Pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana. Kegiatan sebelum bencana diantaranya adalah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. 2) Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. 3) Pasca bencana yang dilakukan pada saat terjadi bencana yang meliputi pemulihan dan pembangunan (rekonstruksi dan rehabilitasi).

Untuk mengetahui lebih lanjut siklus diatas, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian istilah-istilah tersebut menurut Badan Kesbanglimnas DIY, 2009 dalam Purnomo (2011) sebagai berikut:

Pertama, Pencegahan (*disaster prevention*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Kedua, Mitigasi (*mitigation*) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (nonstruktural).

Ketiga, Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Keempat, Tanggap darurat (*emergency respon*) adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan bencana, yang terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian.

Kelima, Rehabilitasi adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.

Keenam, Rekonstruksi adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan beberapa tujuan dari adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa prinsip kunci koordinasi yang menjadi pedoman penanggulangan bencana (Bakornas PB, 2006: 12), yaitu:

- a. Inklusif, Walaupun penanggulangan bencana adalah perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan rakyat, namun disadari pula bahwa hal itu hanya dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. oleh sebab itu, pemerintah sejauh mungkin melibatkan juga perwakilan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI), dan lembaga-lembaga lain secara aktif dalam penanggulangan bencana.
- b. Konsultatif berjenjang, Sesuai dengan tatanan pemerintah di Indonesia, penanggulangan bencana juga mengikuti tataran yang ada, yaitu BNPB ditingkat pusat, BPBD di tingkat provinsi, dan BPBD (Satlak PB) di

kabupaten/kota. Masing-masing lembaga bertanggung jawab kepada pemerintah pada tataran yang bersangkutan oleh karenanya, dalam keadaan normal, hubungan kerja antar tataran bersifat koordinatif konsultatif. Sifat hubungan ini dapat berubah dalam situasi darurat bencana, dimana tataran pemerintah yang lebih atas menyatakan keadaan darurat, sehingga meletakkan tataran di bawahnya dalam status rantai instruksional.

- c. Akuntabel, Penanggulangan bencana berkepentingan langsung dengan keselamatan orang-perorang, kelompok dan masyarakat. oleh karena itu, kinerja kelembagaan dari pelaksanaan penanggulangan bencana diukur semata-mata dari keberhasilan dalam menjaga dan mempertahankan hidup, serta mencegah dan mengurangi kerusakan fasilitas dan harta benda.
- d. Ketepatan dan kelayakan, Ketepatan tindakan merupakan salah satu unsur kunci dari keberhasilan penanggulangan bencana. Ketepatan ini berkaitan dengan jenis tindakan yang masing-masing berbeda sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana.

1.7 Pemerintah Desa

1. Definisi Pemerintah Desa

Menurut Supriadi (2015) pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Atmaja (2016) pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Hariyanto (2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri atas:

- 1) Kepala Desa, sebagai unsur pemimpin yang berwenang dalam:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan APBDes
 - f. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa
 - g. Melakukan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi yang tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan atau secara partisipatif
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014)
- 2) Perangkat desa, sebagai unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
- a. Sekertaris desa, memiliki tugas membantu kepala desa dalam mengkoordinasi pengelolaan keuangan desa dan tugas lainnya sesuai dengan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala desa

- b. Pelaksanaan kewilayahan, membantu kepala desa yang berkaitan tugas kewilayahan
- c. Pelaksana teknis, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional pemerintah desa.

Menurut Jatmiko dan Anwar (2012) pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah yang berkedudukan di bawah camat dan memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. Prinsip-prinsip Pemerintah Desa

Menurut Heriyanto (2015) dalam Sari (2017) prinsip pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan prinsip *good government* yaitu meliputi :

1. Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dalam bertindak guna memberikan pelayanan yang capet, tepat, mudah dan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban serta etika pemerintah dalam pengambilan keputusan di segala bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian maupun penyediaan informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Pelayanan prima, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan dengan prosedur yang baik, kepastian waktu, kejelasan tarif, akses yang mudah, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan yang baik.
5. Demokrasi dan partisipasi, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat di dalamnya agar keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
6. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1.8 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu rumusan yang diperoleh dari kajian teori yang dilakukan pada bab kerangka teori (Syahreza, 2017). Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah kegiatan pra bencana yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak negatif lainnya

2) Bencana alam

Bencana alam adalah suatu peristiwa yang dapat terjadi kapan saja yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang dapat mengakibatkan kehancuran, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga dampak psikologis.

3) Penanggulangan bencana alam.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah suatu upaya pencegahan bencana.

4) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah satuan terdekat dengan masyarakat yang dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Syahreza (2017) yaitu memuat indikator-indikator dari variable penelitian yang didapatkan dari kajian teori. Definisi operasional di maksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah di kemukakan (Utami, 2016).

Dalam definisi operasional ini merujuk pada beberapa teori dari Sutton dan Tierney (2006), LIPI yang bekerja sama dengan UNESCO (2006) yang umumnya mencakup hal yang sama.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan.

Dalam aspek pengetahuan dapat ditentukan berdasarkan:

- a. Pemahaman Tentang Bencana Alam.

2. Rencana tanggap darurat

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek rencana tanggap darurat diantaranya:

- a. Evakuasi

- b. Ketersediaan pertolongan dan penyelamatan pertama

- c. Ketersediaan tempat penampungan sementara

- d. Keikutsertaan pemerintah menentukan lokasi posko bencana

3. Sistem peringatan bencana

Beberapa hal yang penting di perhatikan dalam aspek ini adalah:

- a. Adanya peringatan dini sebagai sumber informasi bagi pemerintah desa.
 - b. Sistem penyebaran informasi sebagai sumber informasi bagi masyarakat desa.
4. Mobilisasi sumber daya
- a. Adanya pelatihan terkait kebencanaan.
 - b. Adanya simulasi bencana.
5. Modal sosial
- a. Partisipasi masyarakat
 - b. Kerjasama antar pihak.

1.10 Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Budiutomo (2016) yaitu sebuah cara atau upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Sedangkan studi kasus menurut Jailani (2013) merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelahaannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan

komprehensif. Pendekatan studi kasus pada hakikatnya terfokus kepada kasus (*case*).

Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah desa yakni Desa Sumberejo dan Kepakisan serta apa upaya yang dilakukan dalam menghindari berbagai ancaman-ancaman bencana khususnya bencana erupsi kawah yang terdapat di dua desa tersebut. maka penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di 2 tempat yakni Desa Sumberejo dan Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Pilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa sumberejo merupakan desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk terkena dampak dari ancaman gas beracun.
- b. Kawah Sileri merupakan kawah paling aktif yang berada di Desa Kepakisan.

3. Unit Penelitian

Unit penelitian ini pada Pemerintah Desa Sumberejo dan Pemerintah Desa Kepakisan.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer menurut Maulidi (2016) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).
- b. Data sekunder menurut Maulidi (2016) adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dll. Berikut dibawah ini lengkapnya mengenai sumber data primer dan data sekunder dari penelitian ini:

Tabel 1.2
Data Primer

No	Nama Data Primer
1	Hasil wawancara Kepala Desa/Perangkat Desa Sumberejo
2	Hasil wawancara Kepala Desa/Perangkat Desa Kepakisan
3	Hasil wawancara kepala PVMBG di Desa Karangtengah
4	Hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat
5	Hasil observasi di Desa Sumberejo dan Kepakisan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

Tabel 1.3
Data Sekunder

No	Nama Data Sekunder
1	UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
2	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3	Data BPBD Kabupaten Banjarnegara
4	Buku-Buku terkait Kesiapsiagaan dll.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2017)

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi.

Observasi menurut Djaelani (2013) yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

2) Wawancara

Wawancara menurut Djaelani (2013) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang di wawancarai. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak diantaranya:

- a. Perangkat Desa Sumberejo sebagai penentu utama kebijakan dan pelaku pemerintahan tingkat desa.
- b. Perangkat Desa Kepakisan sebagai penentu utama kebijakan dan pelaku pemerintahan tingkat desa.
- c. Beberapa tokoh masyarakat sebagai penerima kebijakan yang di tentukan oleh pemerintah desa.

3) Dokumentasi

Menurut Djaelani (2013), dokumen adalah suatu catatan tertulis atau gambar tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini pengambilan data dengan melakukan studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, laporan pada kegiatan kesiapsiagaan, catatan, file, dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Menurut Sukardi (2006) dalam Malik (2015) Bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam analisis data yang penting dalam analisis data kualitatif yang perlu terus diingat sebagai berikut:

- a. Reduksi data, proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan responden.
- b. Penyajian data, Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan.